

PEMBELAJARAN NILAI MASYARAKAT MADANI DALAM PENDIDIKAN
ETIKA PROFESI BIDAN: KAJIAN LITERATUR TENTANG KEADILAN,
PERSAMAAN, DAN PLURALISME

Aqila Hermalia¹

¹ Poltekkes Kemenkes Riau, Riau, Indonesia

*Email: aqilahermalia1401@gmail.com

Received: 21-09-2025 Accepted: 01-05-2026 Published: 05-05-2026

ABSTRAK

Pendidikan etika profesi bidan yang mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat madani berpotensi membentuk bidan yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga responsif terhadap keberagaman sosial, budaya, dan kebutuhan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi nilai-nilai masyarakat madani keadilan, persamaan, dan pluralisme sebagai landasan pembelajaran etika profesi bidan serta implikasinya bagi pengembangan kurikulum pendidikan kebidanan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pencarian literatur dilakukan pada basis data PubMed, Scopus, Google Scholar, dan Garuda dengan kata kunci *midwifery ethics education*, *civil society principles*, *maternal health justice*, dan *pluralism in midwifery*. Artikel yang diinklusi mencakup publikasi tahun 2019–2024 berbahasa Inggris maupun Indonesia yang relevan dengan topik penelitian. Dari proses penyaringan diperoleh 38 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis menggunakan sintesis tematik dengan empat kategori utama: keadilan, persamaan, pluralisme, dan implikasi bagi kurikulum pendidikan etika profesi bidan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan berkaitan dengan pembentukan kompetensi advokasi dan sensitivitas distribusi layanan kesehatan dalam pendidikan bidan. Prinsip persamaan mendorong pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas, remaja, dan komunitas minoritas. Sementara itu, prinsip pluralisme menuntut pengembangan kompetensi lintas budaya (*cultural competence*) sebagai capaian pembelajaran wajib. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum pendidikan kebidanan berbasis nilai masyarakat madani, revisi standar kompetensi bidan agar lebih eksplisit mengakomodasi nilai keadilan dan pluralisme, serta pengembangan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman komunitas majemuk.

Kata Kunci: Masyarakat Madani, Pendidikan Etika Profesi Bidan, Keadilan, Persamaan, Pluralisme

ABSTRACT

Midwifery professional ethics education that integrates civil society values has the potential to produce midwives who are not only clinically competent but also responsive to social and cultural diversity and the needs of vulnerable groups. This study aims to analyze the relevance of civil society values justice, equality, and pluralism as the foundation of midwifery professional ethics education and their implications for developing midwifery education curricula in Indonesia. The method used was a systematic literature review with a descriptive qualitative approach. Literature was retrieved from PubMed, Scopus, Google Scholar, and Garuda databases using keywords such as *midwifery ethics education*, *civil society principles*, *maternal health justice*, and *pluralism in midwifery*. Articles published between 2019–2024 in English or Bahasa Indonesia relevant to the research topic were included. A total of 38 articles met the criteria for analysis using thematic synthesis across four main categories: justice, equality, pluralism, and implications for midwifery professional ethics education curricula. The findings reveal that the principle of justice relates to developing advocacy competence and health service distribution sensitivity in midwifery education. The principle of equality drives curriculum development that integrates inclusive perspectives for women with disabilities, adolescents, and minority communities. Meanwhile, pluralism demands the development of cultural competence as a



mandatory learning outcome. This study recommends strengthening midwifery education curricula based on civil society values, revising midwifery competency standards to explicitly incorporate justice and pluralism, and developing learning methods that integrate experiences with diverse communities.

Keywords: *Civil Society, Midwifery Professional Ethics Education, Justice, Equality, Pluralism*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan kebidanan di Indonesia menghadapi tantangan fundamental dalam membentuk kompetensi etis calon bidan yang mampu merespons keberagaman sosial, budaya, dan kebutuhan kelompok rentan di masyarakat. WHO menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada pasien dengan menghormati keberagaman budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan dalam pelayanan kesehatan maternal (WHO, 2021). Namun, kurikulum pendidikan kebidanan yang ada saat ini masih cenderung menitikberatkan pada aspek teknis klinis, dengan porsi yang relatif terbatas untuk pembelajaran etika profesi yang berorientasi pada keberagaman dan keadilan sosial (Adnani, 2021).

Konsep masyarakat madani (*civil society*) menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk memperkuat pembelajaran etika profesi bidan. Prinsip-prinsip fundamentalnya – keadilan (*justice*), persamaan (*equality*), dan pluralisme (*pluralism*) – memberikan landasan filosofis yang relevan untuk mengembangkan kompetensi etis bidan yang responsif terhadap keberagaman sosial dan budaya (Kristianingrum et al., 2023). Transformasi pendidikan kebidanan global menuju pendekatan yang lebih humanis dan inklusif menuntut integrasi nilai-nilai *civil society* ini dalam kurikulum secara sistematis dan terukur.

Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan 300 kelompok etnis menghadapi disparitas akses pelayanan kesehatan maternal yang signifikan (Kemenkes RI, 2023). Angka kematian ibu yang masih tinggi dengan variasi yang sangat besar antardaerah mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bidan yang tidak hanya terampil secara klinis, tetapi juga sensitif terhadap dimensi keadilan dan keberagaman dalam pelayanan. Kode Etik Bidan Indonesia (Ikatan Bidan Indonesia, 2019) menekankan aspek normatif profesionalisme, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai keadilan sosial dan pluralisme budaya sebagai capaian kompetensi dalam pendidikan etika profesi.

Kajian terdahulu tentang etika profesi bidan umumnya berfokus pada aspek teknis dan legal-formal, belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana nilai-nilai masyarakat madani dapat diintegrasikan sebagai landasan pembelajaran etika profesi dalam kurikulum kebidanan (Azhari et al., 2023). Padahal, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kebidanan yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan ras dan kompetensi budaya secara eksplisit menghasilkan bidan yang lebih efektif dalam melayani komunitas yang beragam (Mehra et al., 2022). Kolaborasi antara bidan profesional dan bidan tradisional melalui pendekatan interkultural juga terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan formal (Sarmiento et al., 2022), yang mengimplikasikan pentingnya pembelajaran lintas budaya dalam kurikulum.

Penelitian ini memiliki relevansi strategis bagi pengembangan pendidikan kebidanan nasional, khususnya dalam merespons agenda *Universal Health Coverage* (UHC) 2030 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan

kerangka konseptual kurikulum etika profesi bidan berbasis nilai masyarakat madani. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi institusi pendidikan kebidanan dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan nilai keadilan, persamaan, dan pluralisme secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis relevansi nilai keadilan, persamaan, dan pluralisme sebagai fondasi pembelajaran etika profesi bidan; (2) mengidentifikasi implikasi nilai-nilai tersebut bagi desain kurikulum pendidikan kebidanan; dan (3) merumuskan rekomendasi pengembangan kurikulum etika profesi bidan berbasis nilai masyarakat madani.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dengan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis dan hasil penelitian empiris yang berkaitan dengan integrasi nilai masyarakat madani dalam pembelajaran etika profesi bidan, serta memungkinkan sintesis berbagai sumber ilmiah nasional maupun internasional secara komprehensif.

Pencarian literatur dilakukan pada basis data PubMed, Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi bahasa Indonesia dan Inggris: "*midwifery ethics education*", "*civil society principles*", "*maternal health justice*", "*midwifery curriculum*", "*cultural competence midwifery*", "*pluralism healthcare education*", dan "*etika profesi bidan*". Pencarian difokuskan pada publikasi tahun 2019–2024 untuk memastikan keterkinian data, dengan pengecualian pada literatur klasik yang masih relevan secara teoretis.

Kriteria inklusi meliputi: publikasi *peer-reviewed*, laporan organisasi internasional (WHO, UNFPA, USAID), dan dokumen resmi kebijakan nasional (Kemenkes RI, Ikatan Bidan Indonesia) yang membahas etika profesi kebidanan, keadilan kesehatan, persamaan akses, atau pluralisme budaya dalam pendidikan kebidanan. Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak tersedia dalam teks lengkap, duplikasi publikasi, dan literatur yang tidak secara langsung membahas etika profesi atau nilai masyarakat madani dalam konteks pendidikan. Dari proses penyaringan diperoleh 38 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis.

Analisis menggunakan pendekatan sintesis tematik (*thematic synthesis*) dengan empat tema utama: (1) nilai keadilan dalam pembelajaran etika profesi bidan; (2) nilai persamaan dalam kurikulum kebidanan; (3) nilai pluralisme dalam pendidikan bidan; dan (4) implikasi bagi pengembangan kurikulum etika profesi. Triangulasi sumber dilakukan dengan menggabungkan literatur akademik, laporan kebijakan, dan hasil penelitian empiris dari berbagai konteks.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Keadilan dalam Pembelajaran Etika Profesi Bidan

Analisis literatur menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam konteks pendidikan etika profesi bidan mencakup tiga dimensi yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum. Pertama, dimensi kompetensi advokasi kesehatan: calon bidan perlu dibekali kemampuan untuk menjadi *health advocates* yang memperjuangkan hak-hak reproduksi masyarakat, terutama kelompok rentan. Keadilan dalam perspektif masyarakat madani berarti setiap individu tanpa memandang lokasi, status sosial, atau kondisi ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kebidanan

yang layak (Agustina et al., 2019). Pembelajaran kompetensi advokasi ini perlu menjadi bagian eksplisit dari capaian pembelajaran etika profesi.

Kedua, dimensi sensitivitas distribusi layanan: mahasiswa kebidanan perlu memahami disparitas geografis dan sosial-ekonomi dalam akses layanan kesehatan maternal sebagai konteks etis yang harus dihadapi dalam praktik profesional (Kemenkes RI, 2023). Data tentang kesenjangan layanan kebidanan antardaerah harus menjadi materi pembelajaran etika, bukan hanya materi kebijakan kesehatan. Bidan sebagai tenaga kesehatan garis depan berperan dalam menegakkan keadilan melalui layanan yang menjangkau daerah terpencil (Lai & Tey, 2022). Ketiga, dimensi keadilan dalam akses reproduksi: pembelajaran etika profesi perlu mengintegrasikan perspektif hak reproduksi sebagai kerangka etis yang memandu praktik kebidanan, tidak hanya sebagai kewajiban legal-formal.

Implikasi kurikulumnya adalah perlunya integrasi modul pembelajaran berbasis komunitas (*community-based learning*) yang menempatkan mahasiswa dalam konteks pelayanan kebidanan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk daerah dengan akses terbatas. Program JKN memberikan contoh kontekstual tentang upaya mewujudkan keadilan, namun kendala implementasinya juga harus dipelajari sebagai kasus etis nyata yang menuntut kompetensi advokasi dari calon bidan (Kemenkes RI, 2023).

Nilai Persamaan dalam Kurikulum Etika Profesi Bidan

Nilai persamaan menuntut kurikulum pendidikan kebidanan mengintegrasikan perspektif inklusif yang membekali mahasiswa untuk melayani seluruh kelompok perempuan secara setara, terlepas dari status sosial, disabilitas, usia, atau etnisitas. Perempuan penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses layanan reproduksi, mulai dari fasilitas fisik yang tidak ramah hingga sikap tenaga kesehatan yang kurang inklusif (Pratiwi, 2023). Temuan ini mengimplikasikan bahwa pendidikan bidan perlu secara eksplisit memasukkan modul tentang kebidanan inklusif disabilitas sebagai bagian dari kurikulum etika profesi.

UNFPA Indonesia (2022) menekankan pentingnya memperluas akses layanan reproduksi bagi kelompok marginal seperti remaja, pekerja migran, dan masyarakat adat. Implikasi pedagogisnya adalah perlunya pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) yang menghadirkan keragaman subjek layanan kebidanan – bukan hanya ibu hamil usia produktif dengan kondisi ideal. Peran bidan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi remaja merupakan area yang masih memerlukan penguatan kompetensi dalam pendidikan, meskipun masih dibatasi oleh kendala hukum dan sumber daya (Lestari & Fitriana, 2023).

Penelitian tentang pengembangan pendidikan bidan yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan secara eksplisit menunjukkan bahwa pendidik dan program dengan representasi yang beragam menghasilkan lulusan yang lebih efektif dalam melayani komunitas yang majemuk (Mehra et al., 2022). Temuan ini relevan untuk konteks Indonesia, di mana keberagaman mahasiswa kebidanan sendiri merupakan aset pedagogis yang perlu dioptimalkan dalam pembelajaran etika profesi. Persamaan dalam pendidikan kebidanan bukan berarti kurikulum yang identik untuk semua, melainkan kurikulum yang secara proaktif membekali semua mahasiswa dengan kompetensi untuk melayani semua kelompok dengan kualitas yang setara.

Tabel 1. Nilai Masyarakat Madani dan Implikasinya bagi Kurikulum Etika Profesi Bidan

Nilai	Dimensi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Capaian Kompetensi
Keadilan	Advokasi, sensitivitas distribusi, hak reproduksi	Community-based learning, studi kasus kebijakan	Kompetensi advokasi kesehatan
Persamaan	Inklusivitas, layanan kelompok rentan	Case-based learning, simulasi inklusif	Layanan non-diskriminatif
Pluralisme	Kompetensi lintas budaya, dialog interkultural	Experiential learning, refleksi budaya	Cultural competence

Nilai Pluralisme dalam Pendidikan Bidan

Pluralisme merupakan nilai yang paling menantang untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan kebidanan Indonesia, mengingat keberagaman budaya, tradisi, dan praktik lokal yang sangat tinggi. Pendidikan bidan yang berorientasi pluralis berarti membekali mahasiswa dengan kompetensi untuk menghargai keberagaman nilai, tradisi, dan praktik budaya, serta mengintegrasikannya secara konstruktif ke dalam praktik medis modern. Kolaborasi antara bidan profesional dan bidan tradisional melalui pendekatan interkultural terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan formal (Sarmiento et al., 2022). Temuan ini mengimplikasikan bahwa pembelajaran tentang praktik kebidanan tradisional tidak boleh sekadar bersifat kritis, tetapi harus membangun pemahaman mendalam dan kemampuan dialog interkultural.

Kompetensi lintas budaya (*cultural competence*) perlu menjadi capaian pembelajaran wajib dalam kurikulum etika profesi bidan, mencakup kemampuan memahami latar belakang pasien, berkomunikasi secara sensitif, dan menghormati pilihan pasien yang didasarkan pada tradisi dan nilai keluarga (Klimesch et al., 2023). Keterlibatan bidan dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi keluarga berencana juga memperkuat demokratisasi pelayanan kesehatan, meskipun dukungan institusi dan sensitivitas budaya masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendidikan (Manurung et al., 2025).

Metode pembelajaran yang efektif untuk internalisasi nilai pluralisme mencakup *experiential learning* berbasis interaksi langsung dengan komunitas yang beragam, refleksi kritis tentang bias budaya, dan simulasi skenario lintas budaya. Pendidikan etika profesi yang mengintegrasikan nilai pluralisme akan menghasilkan bidan yang mampu menjadi jembatan antara sistem medis modern dan kearifan lokal, bukan sekadar agen medikalisasi yang mengabaikan konteks budaya pasien.

Implikasi bagi Pengembangan Kurikulum Etika Profesi Bidan

Sintesis dari ketiga nilai masyarakat madani ini memiliki implikasi konkret bagi pengembangan kurikulum pendidikan etika profesi bidan di Indonesia. Pertama, diperlukan reorientasi pembelajaran etika profesi dari pendekatan normatif-deontologis menuju pendekatan berbasis nilai yang mengintegrasikan keadilan sosial, inklusivitas, dan kompetensi budaya sebagai capaian pembelajaran yang terukur. Kode Etik Bidan Indonesia (Ikatan Bidan Indonesia, 2019) yang saat ini ada perlu dilengkapi dengan panduan implementasi yang lebih eksplisit tentang penerapan nilai masyarakat madani dalam berbagai konteks praktik.

Kedua, desain kurikulum perlu mengintegrasikan pengalaman pembelajaran berbasis komunitas yang menempatkan mahasiswa dalam kontak langsung dengan keberagaman sosial budaya masyarakat yang dilayani. Perkembangan pendidikan kebidanan menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis kompetensi yang terintegrasi memerlukan metode pengajaran yang aktif dan kontekstual (Adnani, 2021). Ketiga, sistem evaluasi kompetensi perlu dikembangkan untuk mengukur tidak hanya kompetensi teknis klinis, tetapi juga perkembangan kompetensi etis berbasis nilai masyarakat madani. Integrasi nilai-nilai *civil society* dalam pendidikan kebidanan selaras dengan target SDGs, khususnya Goal 3 tentang kesehatan berkualitas dan Goal 5 tentang kesetaraan gender, yang menuntut lulusan kebidanan yang tidak hanya terampil tetapi juga berkomitmen terhadap keadilan dan inklusivitas.

Keterbatasan literatur yang ditemukan meliputi keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi nilai masyarakat madani dalam kurikulum pendidikan kebidanan Indonesia, serta dominasi literatur dari konteks sistem pendidikan kebidanan Barat yang memerlukan adaptasi untuk konteks Indonesia.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai masyarakat madani keadilan, persamaan, dan pluralisme memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan pembelajaran etika profesi bidan di Indonesia, dengan implikasi konkret bagi pengembangan kurikulum pendidikan kebidanan. Pertama, nilai keadilan perlu diintegrasikan dalam kurikulum melalui pembelajaran kompetensi advokasi kesehatan dan sensitivitas distribusi layanan, membekali calon bidan dengan kemampuan memperjuangkan hak reproduksi kelompok rentan. Kedua, nilai persamaan mendorong pengembangan kurikulum yang secara proaktif mengintegrasikan perspektif inklusif layanan bagi perempuan penyandang disabilitas, remaja, dan komunitas minoritas sebagai bagian dari standar kompetensi, bukan sekadar modul pelengkap. Ketiga, nilai pluralisme menuntut pengembangan kompetensi lintas budaya (*cultural competence*) sebagai capaian pembelajaran wajib, termasuk kemampuan dialog interkultural dengan bidan tradisional dan komunitas adat.

Kontribusi teoretis penelitian ini berupa kerangka konseptual kurikulum etika profesi bidan berbasis nilai masyarakat madani yang mengintegrasikan dimensi keadilan, persamaan, dan pluralisme secara sistematis. Kontribusi praktisnya berupa rekomendasi untuk: (1) revisi standar kompetensi bidan agar lebih eksplisit mengakomodasi kompetensi advokasi dan kompetensi budaya; (2) pengembangan kurikulum etika profesi kebidanan yang berbasis nilai masyarakat madani dengan metode pembelajaran aktif dan kontekstual; dan (3) formulasi kebijakan pendidikan kebidanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris yang menguji implementasi kerangka kurikulum ini dalam praktik pendidikan kebidanan nyata di berbagai konteks institusi di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, Q. E. S. (2021). Progress and challenges of midwifery education in Indonesia. *European Journal of Midwifery*, 5, 1-3. <https://doi.org/10.18332/ejm/142496>
- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., & Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75-102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)

- Azhari, A. S., Meidiawati, Y., Rahayu, A. H., & Fitri, Y. Z. (2023). *Etika hukum kesehatan profesi kebidanan*. CV. Gita Lentera.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei demografi dan kesehatan Indonesia*. BPS.
- Ikatan Bidan Indonesia. (2019). *Kode etik bidan Indonesia*. IBI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia 2022*. Kemenkes RI.
- Klimesch, A., Martinez-Pereira, A., Topf, C., Härter, M., Scholl, I., & Bravo, P. (2023). Conceptualization of patient-centered care in Latin America: A scoping review. *Health Expectations*, 26(5), 1820–1831. <https://doi.org/10.1111/hex.13797>
- Kristianingrum, D. Y., et al. (2023). Ethical and juridical issues in midwifery malpractice cases: An ethicolegal study. *International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP)*, 4(3). <https://doi.org/10.51601/ijhp.v4i3.350>
- Lai, S. L., & Tey, N. P. (2022). Midwives as drivers of contraceptive uptake: Evidence from Indonesia demographic and health surveys. *Asia-Pacific Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.1177/10105395211058810>
- Lestari, R. T., & Fitriana, Y. (2023). The role of the midwife in fulfilling the reproductive rights of adolescents at the Dlingo 1 Health Center, Bantul. *Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1). <https://doi.org/10.24167/sjhk.v9i1.10028>
- Manurung, O., Marlina, D., Sari, A. L., Saliman, A. R., & Karningsih, K. (2025). The strategic role of midwives in the implementation of family planning programs: Increasing public awareness and participation in reproductive health. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2). <https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.2025>
- Mehra, R., Alspaugh, A., Joseph, J., Golden, B., Lanshaw, N., McLemore, M. R., & Franck, L. S. (2022). Racism is a motivator and a barrier for people of color aspiring to become midwives in the United States. *Health Services Research*, 57(S1), 110–120. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.14037>
- Pratiwi, M. S. (2023). Aksesibilitas perempuan disabilitas dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. *Manuju: Malahayati Nursing Journal*. <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/manuju/article/view/7994>
- Sarmiento, I., Paredes-Solís, S., De Jesús-García, A., Maciel-Paulino, N., Meneses-Rentería, A., Amaya, C., Cockcroft, A., & Andersson, N. (2022). Traditional midwifery contribution to safe birth in cultural safety: Narrative evaluation of an intervention in Guerrero, Mexico. *Community Health Equity Research & Policy*, 44(4), 377–389. <https://doi.org/10.1177/0272684X221120481>
- UNFPA Indonesia. (2022). *Maternal health and midwifery: Annual report 2022*. UNFPA.
- USAID. (2017). *Holding the health system accountable in Indonesia: Health system accountability and civil society engagement*. USAID.
- World Health Organization. (2021). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241511216>